



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Awal 2020, Audit KN Desa Harapan Tuntas

MUKOMUKO - Proses audit potensi kerugian negara (KN) terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pada dana desa (DD) Bukit Makmur Kecamatan Air Rami, diprediksikan selesai awal tahun ini. Ini disampaikan Kajari Mukomuko Hendri Antoro, S.Ag, SH, MH.

Pasalnya tim audit tersebut, dilaksanakan auditor internal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Apalagi seluruh yang dibutuhkan auditor sudah disampaikan Kejari Mukomuko akhir tahun lalu.

"Mudah-mudahan awal tahun 2020 ini sudah ada hasilnya. Kami memiliki auditor di Kejati. Mudah-mudahan selesai," tegas Kajari.

Apakah ada pihak desa yang dipanggil dalam proses audit tersebut? Kajari menjelaskan,

kemungkinan besar segala sesuatunya cukup dengan mempelajari dari dokumen yang ada. Pasalnya sejumlah dokumen penting, berikut dengan bukti-bukti belanja keuangan, sudah disita untuk kepentingan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Kalau ada pihak yang perlu diklarifikasi, bisa dipanggil ke Bengkulu. Sekarang lagi ditelaah dan dihitung. Terkait dokumen yang diperlukan sudah kita se-rahkan," tegasnya.

Untuk diketahui kasus dugaan tindak pidana korupsi DD yang diusut di desa itu, adalah DD pada tahun anggaran 2016-2017. Dilansir sebelumnya, penyidik menduga estimasi KN bisa mencapai Rp 200 jutaan lebih.

"Itukan prediksi atau estimasi kita saja. Kalau akhirnya,

tentu hasil audit kerugian negara nanti," tambah Kasi Pidsus, Andi Setiawan, SH.

Ia optimis ada KN dari dugaan tindak pidana korupsi anggaran DD di desa itu. Dari kegiatan DD pada dua tahun anggaran berturut-turut itu akan ada orang yang bertanggung jawab pada kasus dugaan Tipikor itu.

Dikatakannya setelah penghitungan kerugian negara tuntas, penyidik kembali melakukan ekspose perkara guna memastikan kelanjutan kasus tersebut. Serta untuk menemukan dan menetapkan, siapa oknum yang harus bertanggung jawab.

"Dalam ekspose itu nanti akan diketahui, siapa saja yang harus bertanggungjawab dan untuk diproses lebih lanjut," demikian Andi.(hue)